



Analisis Daya Pikir Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Guna Menangkal Berita Hoax Mengenai Pemilihan Umum 2024

Anisa Dwi Asmaranti

Universitas Negeri Surabaya

Rizky Dwi Sulistyو Rahayu

Universitas Negeri Surabaya

Revienda Anita Fitrie

Universitas Negeri Surabaya

Alamat: Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60231

Korespondensi penulis: anisa.22056@mhs.unesa.ac.id

***Abstract.** Indonesia will hold general elections to elect the president in 2024. Hoax news regarding the election cannot be avoided. The spread of hoaxes is increasingly widespread due to laws that are not yet effective, the use of online media that is not balanced by the abilities of the users, and a lack of public literacy. This research aims to provide solutions in reviewing and developing people's thinking in overcoming and responding to the challenges of hoax information related to elections and future political issues that are more complex. This research used qualitative methods and data collection techniques through literature studies. This paper uses Herbert Simon's theory of rational decision making which shows three steps in decision making, namely identifying problems, finding and developing alternative solutions, selecting and choosing each alternative solution. The result of this research is that problem the spread of election hoax news aims to reduce public trust in election management institutions, election participants, and the government. The author provides several solutions that the public can use as a basis for making decisions regarding the circulation of hoax news, namely: (1) self-criticism; (2) increasing digital literacy; (3) involvement of community leaders; and (4) participatory political education. The author chose the second solution, namely increasing digital literacy, as a solution to minimizing the spread of hoaxes. Digital literacy is the basis for other solutions that can help people develop skills for selecting news on social media.*

***Keywords:** Hoax; 2024 Election; Decision-Making*

Abstrak. Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih presiden pada tahun 2024 ini. Berita *hoax* mengenai pemilu tidak dapat terhindarkan. Penyebaran *hoax* semakin menyebar karena hukum yang belum efektif, penggunaan media online yang tidak diimbangi oleh kemampuan penggunanya, dan kurangnya literasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi dalam meninjau dan mengembangkan daya pikir masyarakat dalam mengatasi dan menyikapi tantangan-tantangan terhadap informasi *hoax* terkait pemilu maupun untuk isu-isu politik kedepannya yang lebih kompleks. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Tulisan ini menggunakan teori pengambilan keputusan rasional oleh Herbert Simon yang memperlihatkan tiga langkah dalam pengambilan keputusan yaitu mengidentifikasi masalah, menemukan dan mengembangkan alternatif solusi, serta menyeleksi dan memilih setiap alternatif solusi yang ada. Hasil dari penelitian ini yaitu masalah penyebaran berita *hoax* pemilu bertujuan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemerintah. Penulis memberikan beberapa solusi yang dapat dilakukan masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan terkait beredarnya berita *hoax* yakni (1) Kritik diri sendiri; (2) Meningkatkan literasi digital; (3) Keterlibatan tokoh masyarakat; (4) Edukasi politik yang partisipatif. Penulis memilih solusi kedua yaitu meningkatkan literasi digital sebagai solusi dalam meminimalisir penyebaran *hoax*. Literasi digital menjadi dasar solusi lainnya yang dapat membantu masyarakat mengembangkan keterampilan dalam memilih berita di media sosial.

Kata kunci: Hoaks; Pemilu 2024; Pengambilan Keputusan

LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia saat ini telah berada dalam suatu era demokrasi dan digitalisasi yang ditandai oleh kebebasan berekspresi, berpendapat, dan memilih seluas-luasnya dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Yani (2019) mengemukakan bahwa kemajuan dari TIK sendiri tentu disatu sisi memberikan dampak positif atau manfaat kepada masyarakat, seperti kemudahan berinteraksi, berkomunikasi, bahkan dalam hal mengekspresikan sesuatu pun bisa lebih leluasa. Namun, disisi lainnya dalam kemajuan TIK juga turut menghadirkan implikasi negatif setelah maraknya media sosial dan perangkat *Smartphone* yakni terkait *hoax*.

Masyarakat di era digital perlu untuk lebih waspada terhadap *hoax*. Terutama beberapa bulan terakhir, *hoax* terkait Pemilu 2024 yang menyebar dengan masif dan luas sebelum, selama, bahkan sesudah pemilihan. *Hoax* pemilu masih menjadi permasalahan krusial yang harus segera diatasi meskipun mungkin pada pemilu-pemilu sebelumnya juga tidak luput dari *hoax*. Hal ini tidak terlepas dari penggunaan media online, khususnya media sosial dalam kampanye dimana beragam informasi terkait pemilu dapat dengan mudah diakses oleh setiap orang (Muslim & Hakim, 2023).

Gambar 1. Sebaran Isu Hoax Pemilu pada Media Sosial (Kominfo)



Sumber : Website Kominfo, 2024

Menjelang dilaksanakannya Pemilu 2024, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Januari 2024) menemukan 203 *hoax* pemilu yang telah diidentifikasi dengan total sebaran di platform digital sebanyak 2.882 konten menurut sebaran pada gambar 1 di atas. Dari jumlah tersebut, temuan *hoax* terbanyak salah satunya ditemukan pada media sosial *Facebook* dan *Twitter* dilaporkan memiliki 1.325 konten dan 947 konten *hoax* terkait pemilu. Platform lain yang juga ditemukan banyak *hoax* pemilu adalah *X/Twitter* sebanyak 947 konten. Berikutnya ada *TikTok* 342 konten, *Snack Video* 36 konten, dan 34 konten pada *Youtube* (CNBC Indonesia, 2024).

Tabel 1. Daftar Berita Hoaks Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Subjek

NO	SUBJEK	BERITA HOAX	PENYEBAB, TUJUAN, DAN DAMPAK
1.	Penyelenggara Pemilu	a. Penetapan hasil pemilu 2024 dimajukan menjadi 28 Februari 2024. b. Gedung bawaslu dibakar oleh pengunjung rasa.	Penyebabnya adalah motif politik. Bertujuan agar masyarakat tidak percaya kepada hasil pemilu. Berdampak pada menurunnya kepercayaan

		<ul style="list-style-type: none"> c. Komisi pemilihan umum telah menerbitkan jadwal pemilihan presiden putaran kedua. d. Ketua KPU ketuk palu dan mengesahkan Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. e. Tiga lapis tembok beton dipersiapkan di sekitaran gedung KPU jelang 20 Maret 2024. 	masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.
2.	Peserta Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> a. Puan Maharani setuju usulan hak angket yang menyebabkan kubu Prabowo Subianto marah. b. Prabowo Subianto disematkan pin kepresidenan sebelum dilantik menjadi presiden. c. Warga negara Cina menjadi Presiden Republik Indonesia. d. Anies dan Muhaimin resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 24 Februari 2024. e. Presiden Jokowi jualan kaos dan bansos “Barter suara buat bocah ingusan” f. Raffi Ahmad akan memberikan bantuan kepada siapapun yang memilih Prabowo dalam Pilpres 2024. g. Demo penolakan hasil pemilu 2024 dipimpin oleh Anies. h. 8 guru ditahan gajinya dan dipaksa memilih paslon nomor urut 2 dalam pilpres 2024. 	Penyebabnya adalah motif politik dan ideologi. Bertujuan untuk menjatuhkan citra pasangan calon lawan politik, mengumpulkan masyarakat yang memiliki pendapat sama guna mendapatkan suara yang lebih banyak. Dampaknya yaitu menurunkan kepercayaan publik terhadap salah satu atau beberapa pasangan calon presiden dan wakil presiden.
3.	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> a. Video darurat keamanan Nasional, Tentara Nasional Indonesia dikerahkan untuk amankan badan pengawasan pemilu. 	Penyebabnya adalah motif politik dan ideologi. Bertujuan untuk menggiring opini masyarakat agar tidak percaya pada pemerintah. Berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Sumber : *Website Kominfo, 2024.*

Beberapa berita hoax mengenai pemilu 2024 telah dirilis oleh Kominfo dalam laporan isu hoax dari rentan waktu 30 Januari 2024 -16 Maret 2024. Beberapa berita tersebut antara lain, penetapan hasil pemilu 2024 dimajukan menjadi 28 Februari, gedung baswalu yang dibakar, dan lain sebagainya. Mewabahnya *hoax* juga dipengaruhi oleh ketidakefektifan penegakan hukum, yang membuat sulit untuk menghukum pelaku *hoax* dengan sanksi yang kurang memberikan efek jera. Selain itu, sebagian masyarakat Indonesia mungkin masih belum terlalu melek media,

sehingga penyebarluasan *hoax* menjadi semakin sulit dicegah. Kurangnya literasi yang memadai akan menyulitkan masyarakat dalam melakukan evaluasi, akses, dan penciptaan terhadap media dan kontennya dalam berbagai bentuk, Karena itu, mereka lebih mudah terpengaruh oleh konten-konten tersebut tanpa adanya rasionalitas terhadap dampaknya.

Penelitian Andriarti, et al. (2024) menyebutkan bahwa terdapat pendekatan baru melalui metode literasi digital yakni konten prebunking yang harapannya membuat orang lebih kebal dengan disinformasi melalui konten yang menjadikan pola, modus, serta contoh-contoh *hoax* yang berulang menjelang pemilu. Muslim dan Hakim (2023) penelitiannya berupa pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan mengajak semua generasi untuk mampu memberikan sosialisasi tentang pentingnya mengantisipasi maraknya *hoax* yang berdampak negatif. Masril dan Lubis (2020) dalam penelitiannya melaksanakan pengidentifikasian *hoax* melalui temuan-temuan di jejaring media sosial dengan pengecekan fakta yang telah tercatat dalam Kementerian Komunikasi dan Informasi yang bertujuan untuk membantu peneliti memahami dalam mengidentifikasi fenomena *hoax* serta menunjukkan akan pentingnya kerja sama antar pemangku kepentingan dalam mengatasi persoalan *hoax*. Anshori, et al. (2023) penelitiannya untuk mengetahui pengaruh literasi politik dan pemahaman politik guna membangun kesadaran dan kontribusi positif terhadap pengendalian informasi *hoax* Pemilu. Rizky, et al. (2021) melaksanakan kegiatan dalam rangka pemberantasan *hoax* melalui metode edukasi yang dikembangkan menjadi program “edukasi pencegahan berita *hoax*” yang melibatkan para *stakeholder* di wilayah tujuannya dengan harapan memotivasi para peneliti dan masyarakat untuk turun tangan serta berperan dalam mendukung pemerintah untuk mengatasi *hoax*. Juditha, C. (2018) dalam penelitiannya mengidentifikasi *hoax* dengan menggunakan teknologi komunikasi melalui aplikasi *hoax checker* guna memerangi berita *hoax* di setiap lembaga pemerintah pusat hingga daerah. Dalam penelitian Nursyamsi dan Siregar (2019) mengkaji karakteristik *hoax* dengan menilai struktur-struktur yang terkandung dalam berita *hoax*. Gustrinanda dan Tanjung (2023) mengidentifikasi persoalan yang ada ditengah proses Pemilu yang berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat di tengah hiruk pikuk berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hate speech*).

Kasus-kasus di atas mencerminkan penyebaran informasi semakin cepat berkembang melalui media sosial dan situs berita lainnya karena penyampaian pesan yang mudah, penyebarannya cepat, namun membuka ruang konflik kepentingan, manipulasi dan berita palsu (*hoax*). Akar permasalahan yang menyebabkan permasalahan lainnya yang merujuk pada merusak pemikiran masyarakat, merusak citra lawan politik, memecah belah masyarakat, dan menimbulkan kegelisahan publik yakni masih adanya media yang memberitakan isu *hoax*. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut karena berita *hoax* pelaku penyebarannya yang tidak terkendali harus sejalan dengan kemampuan penerima berita. Dalam hal ini yakni masyarakat itu sendiri dimana dibutuhkan daya pikir kritis dari masyarakat dalam mengambil keputusan untuk bisa menangkal berita-berita *hoax* pada Pemilu 2024 dengan berdasarkan fakta yang mampu menghambat keberlangsungan *hoax* secara otomatis untuk isu apapun kedepannya. Kajian dalam permasalahan ini bertujuan untuk memahami serta menganalisis bagaimana masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan terkait *hoax* pada pemilu 2024 ini hingga di titik mereka dapat menyaring setiap informasi yang mereka dapatkan yang berhubungan dengan tingkat kepercayaan mereka.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Pemilu

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipal. Pemilihan umum bisa dikatakan telah menjadi *event* politik yang sangat populer

saat ini. Menurut Paskarina, *et al.* (2018), pada era demokratisasi, pemilihan umum (pemilu) memberikan nuansa kepada masyarakat terkait kebebasan berpendapat, berpartisipasi, dan mengekspresikan aspirasinya seperti mendukung salah satu kandidat, mengkritik kandidat yang lain atau kandidat pilihan sendiri jika membuat suatu kesalahan, bahkan tidak segan untuk menyampaikan ketidaksukaan terhadap keseluruhan kandidat. Menurut Pamungkas (2009:27), pemilu diartikan sebagai area para calon pejabat untuk berkompetisi yang didasarkan pada pilihan formal oleh masyarakat sebagai warga negara yang memenuhi syarat. Pemungkas menyebutkan terdapat tiga hal terkait esensi pemilu yang menempati posisi penting di zaman modern ini yakni, pertama menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Kedua, menjadi indikator sebagai negara demokrasi. Ketiga, penting untuk dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu. Dalam hal ini demokratisasi pemilu menjadi alat untuk memperlemah rezim-rezim yang ingin berkuasa. Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, bahwa pemilu menjadi salah satu karakteristik dan alat utama dalam sebuah negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi. Melalui pemilu, masyarakat memiliki saluran yang menghubungkan mereka ke pemerintahan, terutama wakil-wakil mereka yang akan menjadi penyambung kepentingan atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh mereka.

Hoax

Hoax merupakan istilah untuk berita palsu yang belum pasti akan kebenarannya. Menurut definisi tersebut mengandung arti bahwa *hoax* merupakan berita yang sengaja dibuat-buat dengan tujuan tertentu. Listuti (2023) menyebutkan bahwa *hoax* merupakan suatu informasi yang dengan sengaja direkayasa untuk menutupi informasi lain dalam arti mengalihkan perhatian khalayak dari informasi lain yang mungkin lebih sensitif untuk dipublikasikan, sehingga *hoax* menjadi *tools* untuk mengaburkan informasi yang sebenarnya. Berikut macam-macam *hoax* yang disebutkan oleh (Batoebara & Hasugian, 2023) dan (Rizky *et al.*, 2021) yang banyak beredar antara lain: 1) Satire atau Parodi, konten yang mengandung suatu kritikan untuk menyindir pihak-pihak tertentu, 2) Konten Menyesatkan, informasi yang sengaja dibuat untuk mencemarkan nama baik seseorang atau instansi tertentu dengan dikemas seotentik mungkin, 3) Konten Peniruan Identitas, suatu konten yang dirancang untuk mempromosikan sesuatu secara tersurat namun sebenarnya untuk menipu secara tersirat, 4) *Post-truth*, kondisi dimana kebohongan dapat menyamar menjadi suatu kebenaran dengan cara memainkan emosi masyarakat, 5) *Propaganda*, informasi yang disebarluaskan untuk mempengaruhi tingkah laku masyarakat dan opini publik.

Pengambilan Keputusan

Keputusan (*decision*) secara harfiah berarti pilihan (*choice*). Dalam hal ini, keputusan yang dimaksud adalah pilihan dari dua atau lebih pilihan yang mungkin. Selain itu, keputusan yang dicapai setelah melakukan pertimbangan dengan memilih satu dari pilihan yang mungkin (Mardani, *et al.* 2020). Menurut Davis (1988) keputusan adalah hasil dari pemecahan masalah yang berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan, dan seterusnya. Penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat (Rizky, 2020). Sugiono dalam Pasolong (2023) mengemukakan bahwa "Apapun jenis pengambilan keputusan, baik terapan maupun murni, bermula dari masalah untuk menemukan solusi yang dapat digunakan sebagai keputusan".

Simon (1997) sebagai pemegang hadiah Nobel "Teori Pengambilan Keputusan" mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu proses kognitif yang menghasilkan pilihan dari keyakinan atau tindakan yang diambil dari beberapa kemungkinan pilihan alternatif; bisa juga rasional atau bisa juga tidak rasional. Dalam bukunya tersebut Simon menggambarkan proses pengambilan keputusan yang menggambarkan atas 3 tahap, yaitu: (1)

kegiatan inteligen, (2) kegiatan desain, (3) kegiatan pemilihan. Kegiatan inteligen seperti halnya BIN, pengambil keputusan diawali dengan mengidentifikasi situasi dan kondisi lingkungan. Kegiatan desain, pengambil keputusan menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan dari keputusan yang akan diambil. Kegiatan pemilihan, pengambil keputusan memilih satu dari sekian banyak alternatif yang akan dipilih. Kemudian Duker (1993), seorang ahli pemimpin organisasi memberikan rujukan dengan enam langkah dalam proses pengambilan keputusan, yakni: (1) mendefinisikan masalah, (2) menganalisis masalah, (3) menggambarkan alternatif pemecahan masalah, (4) memutuskan satu pemecahan masalah terbaik, (5) merencanakan tindakan yang efektif, dan (6) memantau dan mengevaluasi hasilnya.

METODE PENELITIAN

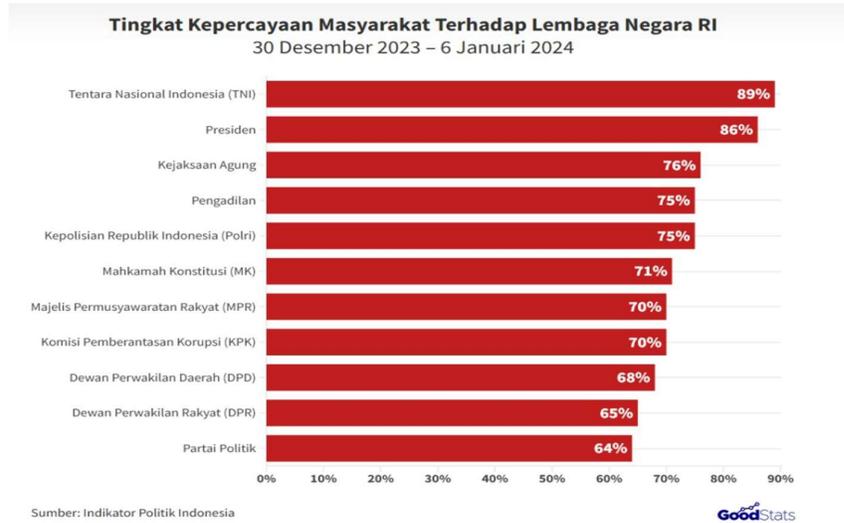
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur adalah jenis penelitian dengan cara mengumpulkan data dan informasi secara menyeluruh melalui berbagai literatur, catatan, buku, dan jurnal-jurnal temuan penelitian sebelumnya yang relevan untuk membangun teori dan solusi untuk masalah yang dibahas (Delmana, 2023). Selain itu, penulis juga menggunakan data-data yang didapatkan dari website kementerian beserta penelitian terdahulu untuk mendapatkan informasi terkait fenomena yang dibahas dalam tulisan ini. Dalam tinjauan teori pengambilan keputusan rasional oleh Herbert Alexander Simon (1997), memperlihatkan tiga langkah dalam mengambil keputusan yakni identifikasi dan mendefinisikan suatu masalah, menemukan dan mengembangkan solusi atau alternatif atas permasalahan yang ada, serta menyeleksi dan memilih setiap solusi yang kemudian dapat diterapkan (Hakim, et al., 2021). Hasil temuan yang didapat dijadikan bahan untuk pemahaman terkait penyebaran *hoax* tentang pemilu yang kemudian digunakan untuk menganalisis sejauh mana masyarakat menggunakan daya pikir rasionalnya dalam mengambil keputusan terkait *hoax* pemilu melalui cara yang tepat dengan tujuan mengatasi dan menyikapi tantangan-tantangan terhadap informasi yang menyesatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Masalah Hoax dalam Pemilu

Berdasarkan hasil fakta di lapangan terkait penyebaran luas berita *hoax* yang berkaitan dengan Pemilu 2024 dapat dilihat pada tabel 1 di atas yang menunjukkan beberapa konten *hoax*, baik yang melalui media sosial, maupun media berita lainnya. Temuan-temuan *hoax* pemilu yang beredar tersebut secara tidak langsung berdampak pada kecemasan dan juga keresahan bagi masyarakat maupun para pemangku kepentingan, terutama ketika ada suatu oknum yang mengimbau pada masyarakat untuk meneruskan berita atau informasi sesatnya dengan tujuan untuk menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu, peserta pemilu, atau bahkan pemerintah sekalipun dengan cara menggiring opini yang dikemas dalam bentuk berita. Pertama, beberapa kasus yang terverifikasi *hoax* yang berhubungan dengan lembaga penyelenggaraan pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan jadwal pilpres untuk putaran kedua, penetapan hasil pemilu 2024 dimajukan menjadi tanggal 28 Februari 2024, dan isu *hoax* lainnya. Berita-berita *hoax* tersebut dapat diyakini oleh masyarakat secara langsung dapat diteruskan kepada kelompok lain hingga tidak terkendali penyebarannya. Kepercayaan publik akibat *hoax* terhadap penyelenggara maupun lembaga pemerintah lainnya menurun meskipun hal tersebut bisa diatasi dengan membangun kembali kepercayaan publik dengan pembuatan berita positif.

Gambar 2. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Negara RI



Hasil survei yang dilaksanakan oleh Indikator Politik Indonesia, terlihat bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki persentase kepercayaan masyarakat tertinggi dengan angka perolehan sebesar 89% dari respondennya. Pada tabel 1 yang menyebutkan konten *hoax* terkait video yang beredar dengan narasi soal pengerahan TNI untuk mengamankan *hoax* kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, ternyata narasi terkait video tersebut terkonfirmasi tidak benar adanya alias *hoax* oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad).

Kedua, berita *hoax* yang ditujukan kepada peserta pemilu antara lain demo penolakan hasil pemilu 2024 dipimpin oleh Anies Baswedan, dan berita *hoax* lainnya. Berita-berita semacam ini dapat menjatuhkan citra pasangan calon atau bahkan pihak lawan di mata para pemilih. Kecenderungan masyarakat ketika menerima sebuah informasi sesuai dengan keyakinan dan juga karakteristik yang dimiliki. Jika masyarakat memiliki pemikiran yang tertutup dan acuh terhadap segala hal yang masuk dalam pandangan yang berlawanan, maka mereka dengan mudahnya percaya tanpa memperdulikan kevalidasian dari suatu berita. Namun, jika masyarakat merupakan pemikir kritis yang ideal dengan pemikiran terbuka yang siap mengeksplorasi ide dari berbagai sudut pandang, termasuk yang bertentangan, maka mereka tidak akan mudah langsung termakan dengan *hoax-hoax* yang ada.

Mengembangkan Solusi atas Permasalahan

Penangkalan berita *hoax* dalam pemilu dapat dilakukan melalui cara yang tepat untuk meninjau kemampuan daya pikir masyarakat dalam mengatasi dan menyikapi tantangan-tantangan terhadap informasi yang menyesatkan terhadap pemilu maupun untuk isu-isu politik kedepannya yang lebih kompleks. Beberapa solusi yang penulis tawarkan dalam menangani permasalahan ini antara lain :

- 1) Diperlukan kritik diri. Dalam hal ini merujuk pada individu itu sendiri karena individu merupakan unit dasar dari masyarakat dimana setiap tindakan maupun keputusan yang berkontribusi pada dinamika keseluruhan masyarakat. Salah satu bentuknya yakni dengan menahan diri untuk tidak langsung percaya terhadap informasi yang diterima seperti informasi-informasi yang bersinggungan dengan Politik dan Pemilu dan memilih untuk tidak mengaburkan fakta yang sebenarnya yang lebih mengutamakan emosi hingga mempengaruhi kesalahan persepsi daripada objektivitas suatu data atau informasi.

- 2) Meningkatkan literasi digital. Upaya ini sudah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun nonpemerintahan, dan juga entitas lain sekalipun melalui pelatihan atau *workshop* terkait literasi digital dengan tema apapun, baik secara online maupun offline seperti yang dilakukan oleh Kemenkominfo pada sektor pemerintahan di lingkungan ASN dalam rangkaian Program Indonesia Makin Cakap Digital. Program tersebut sebagai bagian dari peningkatan literasi digital untuk 50 juta warga Indonesia hingga tahun 2024 (Kominfo, 2023). Literasi digital dapat digunakan untuk memfilter secara manual peredaran berita *hoax* di sosial media. Fitur *report* (laporan) dapat bekerja secara aktif, sehingga media sosial memblokir secara otomatis berdasarkan laporan pengguna. Di sisi lain, langkah ini juga memiliki sisi kurang dimana di era digital ini bukan tidak mungkin informasi yang tersedia hanya terfokus pada satu bidang atau cakupan tertentu, melainkan ada banyak sekali informasi dari berbagai rumpun keilmuan yang memungkinkan masyarakat kesulitan dalam memilah-milah jumlah informasi yang banyak, dan mengalami kesulitan dalam membedakan informasi yang bersifat fakta maupun hanya isu yang belum terklarifikasi kevalidannya.
- 3) Keterlibatan tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh dalam masyarakat seringkali memiliki pengaruh dan citra yang kuat dalam kalangan masyarakat. Mereka biasanya dapat menjadi agen perubahan dalam mengubah persepsi dan tindakan masyarakat. Ketika tokoh-tokoh masyarakat bersatu dalam mendukung upaya menangkal berita-berita *hoax* pada pemilu melalui ajakan untuk menanggapi berita dengan bijaksana, dsb, ini akan membangun solidaritas di antara masyarakat. Namun, hal ini pun memiliki risiko dimana ketika tokoh masyarakat tersebut terlibat dalam eksploitasi atas kepentingan pribadi ataupun memiliki riwayat kontroversial, maka masyarakat akan banyak yang meragukan terhadap kredibilitas dan juga pesan-pesan yang digaungkan oleh si tokoh tersebut.
- 4) Edukasi politik yang partisipatif. Dengan terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan politik, maka masyarakat akan lebih memahami dinamika politik yang sedang terjadi terutama dalam konteks Pemilu, sehingga akan lebih terbuka dan kritis terhadap informasi-informasi yang mereka terima, termasuk *hoax*. Namun, kegiatan ini mungkin tidak dapat secara komprehensif mencakup seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan terhadap pendidikan atau tidak tertarik dalam kegiatan politik, serta adanya risiko berupa pemanfaatan untuk kepentingan politik tertentu, sehingga mengurangi objektivitas dalam kegiatan tersebut.

Memilih dan Menetapkan Solusi atas Permasalahan

Permasalahan terkait berita-berita *hoax* yang masih menyebar secara masif meresahkan banyak pihak, terutama bagi masyarakat dan juga para pihak yang berkepentingan. Dari beberapa solusi yang penulis tawarkan di atas, maka penulis memilih dan menetapkan solusi atau alternatif ke dua yakni meningkatkan literasi digital sebagai solusi yang lebih efektif di antara tiga solusi lainnya. Meskipun upaya tersebut sudah diterapkan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun entitas lainnya, namun masih terdapat sisi dimana masih perlu untuk ditingkatkan seperti pengelolaan beragam informasi yang heterogen secara teratur dan keterbaruan dari materi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, literasi digital dapat dikatakan sebagai dasar atau landasan dari solusi lainnya karena literasi digital membantu masyarakat atau individu sekalipun untuk dapat memiliki dan mengembangkan keterampilan pemahaman mereka terkait cara kerja media digital dan juga algoritma dalam penyebaran informasi secara *online* utamanya. Mengingat berita-berita *hoax* yang tersebar secara masif ada pada media digital yakni media sosial, maka kemampuan untuk menyaring, mengidentifikasi tanda-tanda berita yang mengarah

pada kesesatan secara kritis sangat diperlukan dan hal tersebut didapat dengan adanya literasi digital. Banyak tokoh masyarakat juga tidak jarang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan pengikut mereka. Dengan kemampuan literasi digital yang baik, maka pesan dan isu yang diserukan pun akan ditangkap baik oleh masyarakat, begitu juga saat mengedukasi politik yang partisipatif dan mengkritik diri sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa beredarnya berita *hoax* ini sudah terjadi pada pemilu sebelumnya dan masih terulang kembali pada pemilu 2024 yang disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, penggunaan media online yang tidak diimbangi oleh kemampuan penggunaannya, berita *hoax* sebagian besar tersebar melalui media sosial. Kedua, hukum yang kurang efektif seperti sanksi yang kurang tegas dalam memberikan efek jera bagi penyebar *hoax*. Terakhir, kurangnya literasi di kalangan masyarakat Indonesia menyulitkan masyarakat dalam melakukan evaluasi, akses, dan penciptaan terhadap media dan kontennya membuat mereka mudah terpengaruh. Penulis memberikan pilihan solusi yang dapat dilakukan oleh dalam meninjau kemampuan daya pikir masyarakat untuk mengetahui, memahami, menganalisis, serta menyikapi terkait *hoax* pada pemilu 2024. Pilihan solusi tersebut antara lain :

1. Kritik terhadap diri sendiri, dengan tidak mudah percaya pada informasi yang diterima.
2. Meningkatkan literasi digital. Masyarakat harus bisa menghilangkan keinginan untuk mendapatkan informasi secara instan. Selain itu, bisa dengan mengikuti pelatihan atau workshop terkait literasi digital.
3. Melibatkan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat dapat menjadi agen perubahan dalam mengubah persepsi dan tindakan masyarakat sehingga, mereka dapat melakukan konsolidasi dalam menangkal berita *hoax*.
4. Edukasi politik yang partisipatif. Mengajak masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses politik sehingga mereka lebih memahami dinamika politik yang sedang terjadi terutama mengenai Pemilu 2024.

Penulis memilih dan menetapkan solusi alternatif kedua yakni meningkatkan literasi digital untuk diterapkan oleh masyarakat dalam meminimalisir berita *hoax*. Hal ini karena literasi digital dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan keterampilan media sosial dan algoritma penyebaran informasi secara online lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- Andriarti, A. ., Nurmadewi, D. ., Suharyanti, S., Rindu Dwi Yulianti, Ariyanto, R., & Fadhil, R. (2024). Literasi Digital Melawan Hoaks Pemilu 2024. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 2-3.
- Anshori, A., & Izharasyah, J. R. (2023). Dampak Literasi Politik dan Pemilu 2024 Bagi Pemilih Pemula terhadap Pengendalian Informasi Hoax. *Jurnal Audiens*, 4(1), 11.
- Delmana, L. P. (2023). Strategi Penanganan Hoaks Pemilu Melalui Penerapan Smart Contract Logic Serta Sistem Deteksi Hoaks Otomatis. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(2), 2-9.
- Gustrinanda, R., & Tanjung, T. (2023). Pengaruh Berita Hoax Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dalam Pemilu di Indonesia. *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 2.
- Hakim, F. B., Yunita, P. E., Supriyadi, D., Isbaya, I., & Ramly, A. T. (2021). Persepsi, Pengambilan Keputusan, Konsep diri dan Value. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 1(3), 4.

- Juditha, C. (2018). Hoax communication interactivity in social media and anticipation (Interaksi komunikasi hoax di media sosial serta antisipasinya). *Pekommas*, 3(1), 12-13.
- Kominfo. (2024). Laporan Isu Hoaks. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/all/laporan-isu-hoaks>. Pada tanggal 5 Maret 2024.
- Listuti, E. M. (2023). Penanggulangan Penyebaran Hoaks Yang Mengancam Keamanan Negara Indonesia di Dunia Maya Dengan Pendekatan Bela Negara. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 8(1), 12-20.
- Maina Listuti, E., Fatmawati Raya, J. R., Labu, P., & Cilandak, K. (2023). Penanggulangan Penyebaran Hoaks Yang Mengancam Keamanan Negara Indonesia Di Dunia Maya Dengan Pendekatan Bela Negara. *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia*, VIII, 1.
- Masril, M., & Lubis, F. W. (2020). Analisis Penggunaan Media Sosial dan Penyebaran Hoax Di Kota Medan. *Jurnal Symbolika Research and Learning in Communication Study*, 6(1), 2.
- Muslim, A., & Hakim, L. (2023). Sosialisasi Stop Hoax dalam Mewujudkan Pemilu 2024 yang Aman, Damai dan Bermartabat. "Berdemokrasi Dengan Hati, Bukan Dengan Benci". *Jurnal Dedikasi Madani*, 2(1), 2-3.
- Nursyamsi, S. E., & Siregar, N. (2020). Mengkritisi Berita Hoaks Pemilihan Capres Pemilu 2019 Di Media Sosial Facebook. *Ikon--Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 24(1), 14-18.
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 27.
- Paskarina, C. (2018). Edukasi Anti-Hoax Dalam Pemilu Melalui Metode Debunking. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(5), 2.
- Pasolong, Harbani. (2023). *Teori Pengambilan Keputusan* (Vol. 1). Bandung: ALFABETA.
- Putri Bestari, N(2024). 203 Hoaks Pemilu 2024 Beredar di Medsos, Banyak yang Masih Viral, tersedia di <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240105080338-37-502925/203-hoaks-pemilu-2024-beredar-di-medsos-banyak-yang-masih-viral>, diakses pada 5 Maret 2024.
- Rainer, P. (2024). TNI Miliki Tingkat Kepercayaan Publik Tertinggi di Awal Tahun 2024. Diakses dari <https://goodstats.id/article/survei-indikator-tni-miliki-kepercayaan-publik-tertinggi-januari-2024-9MHW0> pada tanggal 23 Maret 2024.
- Rizki, F. A., Hidayat, M. I., Cheado, S., & Yuliani, Y. (2022). Pencegahan Berita Hoax di Masyarakat Pedesaan Dengan Menggunakan Metode Edukasi. *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*, 1(57), 2-6.
- Ulfa Batoebara, M., & Hasugian, B. S. (2023). Isu Hoaks Meningkatkan Menjadi Potensi Kekacauan Informasi. *Journal Of Information System, Computer Science & Information Technology*, 4(2).
- Yani, C. (2019). Pencegahan Hoax Di Media Sosial Guna Memelihara Harmoni Sosial. *Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi* (Vol. 40).